

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA ANTARA TUNTUTAN DAN REALITA

Muhammad Yasin¹

FAI Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Email:

Abstrak

Lembaga pendidikan tinggi swasta merupakan lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Kiprah lembaga pendidikan swasta sama sebagaimana negeri, mereka ikut andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Hal senada tentunya segala apa yang diharapkan dan diprioritasnya sama, namun kenyataan yang ada di lapangan, lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh yayasan atau organisasi masyarakat selalu kurang mendapat perhatian, apa yang diharapkan terkadang pula masih jauh dari harapan. Lembaga Penjaminan Mutu, akhir-akhir ini muncul sebenarnya untuk menjembatani lajunya perjalanan lembaga tersebut untuk melayani, mengontrol dan mengevaluasi keberadaan lembaga tersebut. Kebutuhan lembaga ini tentunya harus mendapat dukungan oleh civitas akademika. Visi misi lembaga pendidikan yang dicanangkan dan diharapkan oleh yayasan atau ormas yang menangani lembaga pendidikan, harus dapat dilihat bilamana Lembaga Penjaminan Mutu berjalan dengan baik. Begitu juga control yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menjadi kebutuhan lembaga/ instansi, karena melalui assesmen keberadaan lembaga tersebut layak mendapatkan pengakuan secara nasional, dengan harapan masyarakat pengguna tidak mengalami kekecewaan saat menempuh proses pendidikan.

Kata Kunci: *PTAIS , Lembaga Penjaminan Mutu, dan BAN PT.*

A. Pendahuluan

Terkadang orang berkata sinis terhadap persoalan yang dia lihat, pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, aturan masyarakat bahkan ketatanegaraan, dsb. Persoalan yang dipandang

¹ Dosen tetap prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.

perlu walaupun tidak berdasarkan apriori seseorang, namun realita yang dijalankannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang banyak. Banyak hal yang dapat kita saksikan bersama, baik yang terkait hajat orang banyak, terkadang tidak menunjukkan kepuasan orang banyak. Persoalannya terkadang tidak terlepas aturan yang diterapkan/dijalankan tidak sesuai prosedurnya atau tergantung pola seseorang/perorangan yang menjalankannya, baik itu terkait dengan lembaga, organisasi, ormas, bahkan kepengurusan negara, bahkan terkesan masih ketergantungan seseorang figur atau tokoh.

Kalau yang kita saksikan adalah proses tentunya komponen yang melengkapinya diharapkan sesuai dengan prosedur yang dijalankannya, sedangkan kalau yang diharapkan adalah hasil tentunya kelengkapan tarjet yang dicanangkan oleh institusi harus jelas dan terukur.

Proses prosedur dan evaluasi kerja adalah dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, disamping masih ada unsur utama adalah tujuan. Berbicara mengenai tujuan, akan terkait dari faktor kelengkapan dan faktor keberadaan. Dua faktor terakhir ini merupakan kelengkapan minimal yang terkadang diabaikan seseorang atau organisasi apapun untuk dijalankannya.

Perkembangan sekarang, orang lebih mengenal apa yang dinamakan TQM (*Total Quality Manajemen*), prinsip yang dilakukan TQM adalah mampu untuk dilakukan secara sempurna di tengah masyarakat luas, baik di organisasi, ormas, atau institusi kecil-kecilan setingkat RT. Lagi-lagi persoalan ini tidak mudah untuk diabaikan begitu saja, karena akan menyangkut nama atau kualitas yang disandangnya.

Mewujudkan apa yang diinginkan organisasi atau institusi yang sekarang menjadi sorotan masyarakat luas akan keberlangsungan lembaga pendidikan yang dilihatnya. PTAIS saat ini harus berbenah diri untuk menghadapi persaingan perguruan tinggi swasta khususnya Perguruan Tinggi Agama pada masa mendatang. Diantara yang seharusnya kita perhatikan terkait Ijin Operasional, pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni, NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) yang harus ada pada tenaga fungsional, Jabatan Fungsional yang harus dimiliki, dan keskiapan lembaga pendidikan. Mana kala mahasiswa yang ditampung melebihi kapasitas, atau sebaliknya manakala animo mahasiswa baru semakin berkurang.

B. Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan, pada bagian ketiga Pendirian Perguruan Tinggi pasal 60 menyebutkan:

1. PTN didirikan oleh pemerintah,
2. PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri.
3. Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
5. Perguruan tinggi wajib memiliki statuta.
6. Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah arus pergerakan di bidang pendidikan mengemban tanggungjawab yang besar, melihat persyaratan yang harus disertakan untuk memenuhi proses, sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang pendidikan di atas. Memenuhi yang diharapkan undang-undang di atas standar yang harus dipenuhi PTN dan PTS adalah minimum akreditasi.

Dengan diperundangkannya ketentuan lembaga tinggi di negara kita, diharapkan untuk mampu berinteraksi di dunia pendidikan seperti yang diharapkan. Namun realitas/kondisi di lapangan belum semua lembaga tinggi berstatus akreditasi, walupun semua program studi pada lembaga swasta dalam proses akreditasi masih banyak.

Beranjak ke arah akreditasi program studi saat ini sedang menjadi perhatian semua lembaga tinggi, memerlukan pemikiran yang riil bilamana standar akreditasi benar-benar diterapkan, hal mana terkait: status pemilikan lembaga tersebut, kualifait sumber daya manusia, sistem pelayanan pendidikan yang membanggakan, layanan perpustakaan yang menjadi jantungnya perguruan tinggi, dan aktifitas mahasiswa terkait intra dan ekstra kulikuler., serta tidak kalah pentingnya Lembaga Penjaminan Mutu. Kalau semua unsur akan kita runtut satu persatu, diperlukan dukungan semua civitas akademika yang lengkap dan mendukung, tidak sekedar, komponen masing ini dikerjakan sekedar memenuhi assesmen, sehingga setelah assesmen pergi pergi pula data yang diperlukan, inilah sebenarnya menjalankan sistem bukan kata manajer yang memimpin lembaga tersebut.

Menjadikan lembaga tinggi yang tengah berjalan untuk membenahi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah, tidak semudah apa yang diharapkan oleh angan-angan, bilamana semua sektor dipenuhi oleh lembaga perguruan tinggi.

Lembaga tinggi swasta memiliki peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri, mempunyai peran mencerdaskan bangsa terkadang memiliki instrik sendiri dikala berhadapan dengan realita perjalanannya, hal mana kesemuanya memmpunyai sisi kekurangan dan terkadang harus menutup kekurangan yang ada. Persyaratan yang diinginkan oleh peraturan pemerintah diatas, diharapkan celah kekurangan mampu dipenuhi sebaik mungkin. Salah satu riil dari sisi sumber daya manusia (SDM) tenaga dosen saja, kualifikasi yang harus disaratkan adalah memiliki ijazah strata-2, bilamana menghendaki sebagai tenaga dosen, proses selanjutnya memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), salah satu persyaratan ini saja terkadang mengalami kendala kemampuan berbahasa dan tes potensi akademiknya. Belaum lagi persaratan lainnya adalah dosen harus memiliki sertifikasi pendidik, dimana ketentuan ini tidak mudah diperoleh.

Lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dibidang agama, tidak terlalu jauh yang

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2012), hlm. 43-44

dipersaratkannya bilamana seseorang akan memperoleh predikat dosen, untuk itu kajian ini sebenarnya menarik untuk kita sikapi secara arif dan komprehensif, tidak serta merta pimpinan lembaga tinggi walaupun memiliki integritas mandiri, perlu adanya pembinaan dan penelusuran terhadap calon tenaga pendidik yang mumpuni dan memiliki integritas tinggi terhadap beban yang dipegangnya.

C. Tipe Manajemen Perguruan Tinggi Swasta

Mewujudkan lembaga tinggi swasta yang diinginkan masyarakat luas menjadi dambaan semua elemen masyarakat. Dalam rangka mewujudkan impian yang sedemikian tinggi tersebut, lembaga tinggi swasta diharapkan mampu menempatkan posisinya sebagai lembaga independen, yang mengelola dan manajemen sendiri oleh yayasan yang mengayominya. Manajemen menjadi acuan penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi atau menengah kebawah, hal mana persoalan yayasan nampaknya perlu dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan kriteria lembaga pendidikan yang terbaik.

Membicarakan lembaga pendidikan tinggi swasta, memerlukan pemikiran dan penanganan serius, hal ini PTS diperlukan adanya pengelolaan komprehensif unsur-unsur minimal terpenuhi secara baik akan membuat lembaga pendidikan tersebut terangkat namanya di tengah masyarakat, diantara persoalan yang terkadang muncul di lembaga tinggi muncul adalah:

1. Minimnya dosen tetap yang ada pada prodi masing-masing.
2. Minimnya mahasiswa pada masing-masing program studi
3. Terkadang kurangnya kesinkronan antara harapan yang diinginkan dengan realisasi pelaksanaan program.
4. Kurangnya penghargaan bagi mahasiswa dan tenaga dosen maupun tenaga kependidikan dari pemangku kebijakan.
5. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk melengkapi pelaksanaan proses.

Persaingan lembaga pendidikan tinggi swasta yang bersaing ketat dengan lembaga pendidikan negeri yang begitu kuat ditengah masyarakat, dituntut bagi lembaga pendidikan swasta bekerja ekstra ketat untuk menjaring kuantitas mahasiswanya. Realita yang dituntut tidak sesederhana penjangkaran melalui promosi besar-besaran. Memasuki era berkembang terhadap persyaratan eksistensi lembaga pendidikan tinggi swasta maupun negeri cukup dicermati sedemikian rupa. Beberapa persoalan yang terkadang muncul bagi lembaga pendidikan tinggi swasta, *pertama* sumber daya manusia yang betul-betul lepas dari ikatan dengan lembaga lain. Manakala masih belum mendapatkan homebase mereka dengan penuh semangat bergabung dengan lembaga pendidikan swasta yang memanggil sebagai sumber daya manusia dibidang tenaga pengajar/dosen, proses selanjutnya adalah didaftarkan untuk mendapatkan NIDN. Karena NIDN cikal bakal sebagai tenaga pengajar/dosen. Proses berikutnya mereka diproses untuk mendapatkan P.A.K (Penghitungan Angka Kredit) sebagai bukti sebagai tenaga fungsional dengan persyaratan minimal strata dua. Baik melalui kopertis (dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) maupun melalui Kopertais (di bawah kementerian Agama Republik Indonesia).

D. Problematika Perguruan Tinggi Swasta

Muncul sinyalemen yang sering terjadi manakala pimpinan perguruan tinggi swasta berorientasi kedepan, dengan terwujudnya elemen kebutuhan persyaratan lembaga pendidikan swasta. Seiring perkembangan kemajuan SDM dan lembaga pendidikan tinggi pada 10 tahun terakhir, dibutuhkan sinergis antara pemangku polesai pimpinan dengan staff dibawahnya, hal ini nampaknya akan mewujudkan kemajuan terhadap lembaga tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa dan alumni, dimana dua faktor terakhir ikut andil besar akan kemajuan yang sangat berarti bagi lembaga tersebut.

Peran aktif mahasiswa misalnya kegiatan kemahasiswaan diharapkan adanya wadah untuk menyalurkan adanya bakat dan minat yang terkadang dimiliki oleh mahasiswa. Rasa memiliki di kalangan mahasiswa akan terwujud bilamana pemupukan terhadap mahasiswa betul-betul dirasakan oleh mahasiswa yang bersangkutan, semisal kegiatan bakti sosial, kegiatan ilmiah mahasiswa, kegiatan wirausaha yang terwadahi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik tingkat Universitas maupun Tingkat Fakultas. Keseluruhan apa yang terjadi di lembaga tinggi swasta adalah masih pada kisaran pendanaan yang diperuntukkan kepada mahasiswa dalam hal kegiatan mahasiswa, namun terkadang juga kurangnya profesional mahasiswa dalam menangani sebuah kegiatan dimana minimnya manajemen mahasiswa.

Kita semua sebenarnya telah dan pernah menjadi mahasiswa, dimana apa yang dilakukannya tidak berakhir dengan laporan yang memuaskan. Berangkat dari perencanaan kegiatan, berjalannya proses kegiatan dan evaluasi program yang dilakukannya. Kebuntutan manajemen yang dilaksanakan oleh mahasiswa, sangatlah perlu diakan latihan kaderisasi kepemimpinan di kalangan mahasiswa, tidak serta merta mahasiswa diperlakukan hanya pada pelaksaan saja. Hal semacam ini sering muncul/terjadi dikarenakan miskomunikasi antara pimpinan dengan mahasiswa.

Kesemuanya dari paparan diatas sebenarnya diharapkan mengacu kepada sistem penjaminan mutu diperguruan tinggi baik ditingkat perguruan negeri maupun perguruan tinggi swasta. Penjaminan mutu di Perguruan Tinggi merupakan strategi Direktur jenderal Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indoensia sebagaimana tertuang dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS), sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.³

Fenomena yang terjadi diperguruan tinggi khususnya swasta yang sering kita jumpai di Negara kita terkadang belum sepenuhnya terpenuhi dari harapan masyarakat, masih perlu berbenah diri secara simultan. Hampir semua komponen yang ada didalamnya diharapkan menyadari akan kekurangan dilembaganya. Pertemuan-pertemuan pada semua masing-masing

³ Rinda Hedwig, *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Monitoring & Evaluasi Internal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 1

bidang selalu dibenahi untuk menutup kekurangan yang ada, hal semacam ini tentunya animo terhadap lembaga tersebut akan semakin meningkat. Melalui proses penerimaan mahasiswa, proses perkuliahan, pengelolaan kinerja dosen, pengelolaan mahasiswa pada tataran kegiatan intra dan ekstra kulikuler, maupun sarana prasana diharapkan terpenuhi secara bertahap.

Penjaminan mutu diharapkan dilakukan diseluruh perguruan tinggi dengan memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain: kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri.⁴

Kesemuanya terkadang masih ada yang terlewatkan yaitu sistem pemasaran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mebranding keberadaan lembaga tersebut, hal semacam itu tentunya membutuhkan ekstra kegiatan-kegiatan atau dana yang memadahi, namun hal semacam ini terkadang tidak menjadi focus utama dalam pengelolaan lembaga tinggi. Walaupun yang sudah terbiasa dilakukan pada lembaga tinggi adalah seminar, baik nasional maupun internasional, pertukaran mahasiswa, stady banding antar lembaga tinggi, maupun kerja sama antar instansi maupun antar lembaga. Dalam kajian teori manajemen pemasaran disebutkan Walaupun proses pengembangan dan implementasi iklan seringkali merupakan tanggungjawab utama suatu biro iklan, tetapi adalah penting agar para personil manajer periklanan, manajer produk, dan manajemen pemasaran tingkat atas mengambil bagian aktif dalam proses ini. Khususnya , adalah penting bahwa para manajer menetapkan sasaran iklan yang (1) sesuai dengan strategi pemasaran,(2) cukup spesifik untuk memberikan pedoman bagi orang-orang dibagian iklan dan media, dan(3) dapat diukur sehingga para manajer dapat secara efektif menilai efektivitas program.⁵

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang selalu dilakukan secara kontinyu secara berkesinambungan. Karena diawali dari perencanaan, proses dan evaluasi proses. Dimana proses monitoring dan ealauasi perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari kesalahan, melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan yang bersifat terus menerus. Proses Monitoring Dan Evaluasi Internal (MonevIn) dapat dilakukan oleh tim yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa personil dalam hal ini dapat dilihat tabel di bawah ini.

4 Rinda Hedwig, *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Monitoring & Evaluasi Internal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 2

5 Joseph P.Guiltonan dan Gordon W. Paulalih bahasa Agus Maulana, *Strategi Dan Program Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga, 1994), cetakan keempat, hlm. 273.

Tabel 1
Tugas dan Fungsi MonEvIn

Pemeriksaan	Penilaian	Evaluasi
a. Meninjau pemenuhan persyaratan dan sistem dan sistem yang diwajibkan b. Meninjau kepatuhan persyaratan dan sistem yang diwajibkan. c. Meninjau kepatuhan terhadap rencana dan program kerja. d. Proses yang dijalankan sesuai dengan apa yang ditulis. e. Memeriksa manual mutu, catatan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, wewenang dan tanggung jawab, formulir sudah dijalankan sesuai dengan dengan ketentuan. f. Pelaporan hasil audit dalam bentuk comply, not comply (major and minor), abservasi.	a. Mengkaji dan menilai seberapa baik rencana dan produk memenuhi kepuasan stakeholder. b. Mengkaji apakah standar yang ditetapkan sudah dipenuhi. c. Meninjau adakah masalah dengan produk. d. Meninjau bagaimana produk dikembangkan lagi. e. Mendeteksi secara dini masalah, hambatan dan penyimpangan terhadap proses yang berlangsung. f. Mengirim pesan kepada pimpinan dan penanggungjawab kegiatan atas penyimpangan yang terjadi. g. Pelaporan hasil berupa rekaman bagus tidaknya spesifikasi produk, proses dan rekomendasi, dijadikan bahan feedback kepada yang berwenang.	a. Menilai dan menentukan apakah produk yang dihasilkan penting atau tidak penting, pantas atau tidak pantas, bagus atau buruk, benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai b. Menilai dan menentukan apakah produk yang dihasilkan menarik, sukar, berguna, efektif secara ungsional, mahal, terlalu banyak, terlalu rumit, terlalu sedikit, atau berantakan. c. Hasil dari audit dan asesmen dievaluasi dan dijadikan bahan pengambilan keputusan, tinjauan manajemen, tindakan korektif dan perbaikan mutu secara terus menerus.

Tabel diatas menggambarkan sebuah perencanaan program yang ditindak lanjuti oleh evaluasi program yang harus dilakukan oleh sebuah kegiatan, sehingga tolok ukur akan terlihat secara jelas apa yang diharapkan dari sebuah perencanaan program. Indikator kinerja merupakan kunci kegiatan monitoring, yang diharapkan visi dan misi yang ditetapkan dapat dicapai. Visi dan misi yang telah ditetapkan akan dijabarkan kedalam rencana strategis institusi yang implementasinya dilakukan dengan menentukan kebijakan mutu dan sasaran.

E. Pemecahan Persoalan

Lembaga pendidikan tinggi yang marak diselenggarakan oleh yayasan lembaga tinggi baik di tingkat kabupaten maupun propinsi, akhir-akhir ini disibukan dengan akreditasi dan reakreditasi. Sinyalemen yang terkadang muncul bahwasanya data pendukung sangat diperlukan

untuk mewujudkan apa yang ditulis didalam borang atau laporan institusi. Namun realitas untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh assesmmen tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Sana sini masih dibutuhkan dengan gaya dadakan hanya untuk memenuhi kebutuhan assesmen. Untuk iitu pada pembahasan ini dapat dirangkum sebuah pendekatan realitas yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga pendidikan baik ditingkat prodi atau institusi perencanaan program sebaik mungkin dipersiapkan.
2. Pelaksanaan program menjadi tolok ukur terlaksananya acuan kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan baik.
3. Masing-masing komponen yang terdapat pada instansi tersebut terkadang banyak persoalan-persoalan yang menjadikan tidak baik perjalanan yang institusi tersebut.

Untuk menjembatani persoalan yang muncul pada masing-masing prodi maupun lembaga secara menyeluruh, terkadang susah untuk mengawali darimana cara pembenahannya, berikut ini pendekatan yang dapat dilakukan secara secara simultan untuk bisa diitindak lanjuti pada lembaga masing-masing. Contoh persoalan yang muncul ada seorang dosen yang mengajar pada salah satu program studi yang mengajar sampai 20 sks, sementara beban mengajar dosen minimal 12 sks, karena dosen yang bersangkutan memiliki keilmuan yang dimiliki oleh dosen lain, hal semacam itu dilakukan, demi baiknya manual proses tetap berjalan.

Masih banyak hal yang sering terjadi pada lembaga tinggi yang masih harus berbenah diri, tidak semena-mena hanya memenuhi kebutuhan sesaat dimana dikala assesmen datang, kesemuanya terwujud dengan serta merta, bahkan dokumen yang tersedia terpenuhi namun sistem proses yang dijalankannya, terkadang tidak dilaksanakan.

F. Kesimpulan

Melihat pentingnya sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan melihat realita lembaga pendidikan yang berada pada masing-masing masih banyak yang harus dibenahi. Untuk itu masih banyak yang harus dicermati dan pembenahan dari semua komponen proses pembelajaran, proses tata pamong dan pengambilan keputusan.

Komponen yang terlibat Penjaminan Mutu adalah sivitas akademika yang ada didalamnya, mulai rektor , dosen, dekanat, ketua program Studi, adminitrasi , kegiatan mahasiswa sampai perjaga kampus.

Berbagai permasalahan yang muncul selama ini diharapkan komitmen semua civitas akademik untuk menyempurnakan lembaga pendidikan tinggi khususnya lembaga tinggi agama dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa indoensia. Semua hal yang telah dilakukan menuju kesempurnaan selalu legawa menerima masukan dari berbagai lini.

BIBLIOGRAFI

- Edward Sallis, Alih bahasa Ahmad Ali Riyadi, *Total Managemen in Educational Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Yogyakarta : cetakan pertama, 2010
- Joseph P.Guiltinan dan Gordon W. Paulalih bahasa Agus Maulana, *Strategi Dan Program Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Erlangga, 1994, cetakan keempat.
- Ristekdikti, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran*, 2016.
- Rinda Hedwig, *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Monitoring & Evaluasi Internal*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007
- Rafiq Karsidi dkk, *Informasi Bidang Kemahasiswaan Universitas Sebelah Maret Surakarta Tahun Akademik 2016/2017*
- Undang-Undang Republik Indonesia *No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi* , Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2012

